

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa orde baru ekonomi Indonesia mengalami kejayaan, ia pernah mencapai tingkat tertinggi sehingga banyak para pengamat ekonomi dan dunia memuji bangsa Indonesia. Memang pada tahap awal pembangunan ekonomi Indonesia sangat menjanjikan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat meyakinkan. Didalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu pemerintah mencari sumber – sumber dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber – sumber pembentukan modal antara lain tabungan baik dalam negeri, luar negeri, atau kombinasi keduanya. Ternyata dana domestik guna membiayai pembangunan mengalami kekurangan sehingga tidak mampu memicu proses pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga untuk menutupi kekurangan itu maka Indonesia mencari sumber dana dari luar negeri yaitu dengan hutang luar negeri.

Pinjaman luar negeri ini diandalkan untuk membiayai pembangunan, memobilisasi sumber daya, meningkatkan produksi dan ekspor, memperbaiki neraca pembayaran dan manfaat ekonomi lainnya. Tetapi, utang ini bukan hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi saja melainkan juga politik, sosial, budaya, geografis *altruistic* (kemanusiaan) dan pertimbangan lainnya. Oleh sebab itu hutang luar negeri masih diperdebatkan, baik oleh ahli ekonomi, sosial politik maupun ahli – ahli lainnya. Ahli kanan atau kapitalis

berpendapat bahwa sering bermotifkan politik dari pada ekonomi yang menyebabkan terjadinya konflik ekonomi, sosial dan politik antara negara kreditur dan debitur tetapi paham kanan pun mengakui bahwa utang luar negeri cukup berhasil dalam mendorong perekonomian suatu negara tersebut menggunakannya untuk kepentingan publik dengan dukungan masyarakatnya. Di lain pihak, paham kiri atau sosialis (seperti Lappe, Hancock, Gitelson) mengkritik utang luar negeri sebagai cara untuk memperkokoh kekuasaan yang ada akibat terpusatnya sumber – sumber produksi ditangan segelintir orang. Oleh sebab itu utang luar negeri tidak membantu kelompok miskin, tetapi justru membantu kelompok penguasa karena utang itu sering dijadikan alat untuk mempengaruhi kebijakan negeri debitur demi pasar mereka. (Sukarna, W dan Mamun, S. 2005 : 91 – 95)

Utang luar negeri Indonesia dicirikan pada meningkatnya pinjaman yang bersifat komersial. Membesarnya pinjaman komersial ini akan membawa berbagai dampak kepada perekonomian nasional. *Pertama*, terjadinya ekspansi moneter yang akan mempengaruhi kestabilan ekonomi makro dan neraca pembayaran. Hal ini dikarenakan bahwa pinjaman komersial berjangka pendek yang dilakukan oleh pihak swasta menyebabkan penarikan pinjaman ini tanpa pemantauan otoritas moneter. Efeknya adalah kebijakan moneter yang dijalankan tidak akan mencapai sasaran yang juga pada akhirnya akan mengganggu pencapaian sasaran ekonomi makro. *Kedua*, berkaitan dengan adanya gejolak nilai tukar mata uang dunia yang dapat dengan seketika melonjakkan beban pembayaran kembali pinjaman.

Perekonomian dunia yang semakin terbuka semakin memperbesar ketidakpastian dari nilai tukar mata uang negara – negara maju. *Ketiga*, kecenderungan peningkatan pinjaman maka akan menyebabkan tingginya *country risk* di Indonesia. (Yuswar dan Mulyadi, 2003 : 107 – 108)

Ini terbukti, seiring waktu yang tidak terlalu lama setelah krisis moneter Thailand. Nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dollar Amerika Serikat, kemudian menjalar dengan cepat menjadi krisis kepercayaan, yang selanjutnya menimbulkan krisis sosial yang kemudian mempercepat terjadinya krisis politik, yang sebelumnya memang sudah panas. Pada gelombang II, krisis politik memeperdalam dan memepertebal krisis moneter, krisis kepercayaan dan krisis sosial, sehingga timbullah krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam krisis ekonomi ini memeperkuat krisis yang lain dan begitu seterusnya sehingga terjadilah *vicious circle*, krisis ganda bgaikan benang kusut (Baslim et. Al. 2000). Kini, ketika beberapa negara lain yang juga terkena krisis ekonomi termasuk Thailand, sudah bangkit kembali perekonomiannya, Indonesia juga masih terpuruk dalam kondisi ketidakpastian mengenai masa depan pembangunan ekonominya. (P.U.Yuni dan I.H. Maulidiyah, 2005 : 212 – 213)

Sementara itu, jumlah utang luar negeri masih tetap besar, meskipun kesepakatan dengan IMF telah berakhir. Jumlah utang yang besar ini sebagai akibat dari pinjaman proyek yang meskipun turun Rp 19,7 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 18,1 triliun pada tahun 2005, tetapi pinjaman program meningkat dari Rp 8,5 triliun menjadi Rp 8,6 triliun pada periode yang sama.

Akibatnya cicilan utang meningkat yaitu dari Rp 44,4 triliun menjadi Rp 46,8 triliun pada dua tahun terakhir, dan mencapai puncaknya pada tahun 2007 dan 2008. Di lain pihak, rasio utang luar negeri terhadap APBN turun dari 60 persen menjadi 55 persen selama periode yang sama. (Wiranta, Sukarna. 2004 : 26)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menambah pinjaman luar negeri dalam APBN 2006 sebesar US\$ 3,55 miliar (sekitar Rp 33 triliun). Hal itu, disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR, senin (6/2). Rencana penerimaan pinjaman luar negeri tersebut terdiri atas pinjaman program sebesar US\$ 1 miliar (Sekitar Rp 9,3 triliun) dan pinjaman proyek US \$ 2,546 miliar (sekitar Rp 23,678 triliun). Rinciannya, pinjaman program didapat dari Bank Pembangunan Asia (ADB) US \$ 1 juta (setara Rp 9,3 miliar), Bank Dunia US \$ 400 juta (sekitar Rp 3,72 triliun) dan Jepang US\$ 100 juta (setara Rp 930 miliar). Sementara pinjaman proyek di dapat dari Bank Dunia US\$ 350 juta (Rp 3,255 triliun), ADB US\$ 317,6 juta (Rp 2,95 triliun), Jepang US\$ 610,10 juta (Rp 5,674 triliun), pinjaman multilateral lainnya US\$ 110,0 juta (Rp 1,023 triliun dan pinjaman bilateral lainnya US\$ 193,3 Juta (Rp 1,797 triliun). Per 31 des 2005 stok utang luar negeri Indonesia mencapai US \$ 61,04 miliar (sekitar Rp 567,67 triliun) terdiri atas 51 persen pinjaman bilateral, 0,3 persen Bonds and Notes, 0,1 persen komersial kredit, 19,4 persen kredit ekspor, 0,2 persen leasing dan 29 persen pinjaman multilateral. (Temp. Interaktif. 2006)

Biasanya, lembaga donor menyaratkan adanya suatu *policy matrix* yang harus dipenuhi pemerintah seperti misalnya melalui penerbitan UU atau PP yang mendukung. Jelas bahwa *policy matrix* tersebut sangat politis, tetapi terkadang berguna dalam memberi masukan kepada pemerintah. Pinjaman akan sangat berbahaya jika pengelolaannya tidak dijalankan dengan baik (baca: *default*). Andaikata pun terjadi *default*, lembaga donor kemudian akan “memberikan” opsi – opsi khusus yang disebut *letter of intent (LoI)*, *policy matrix*, dan sebagainya. Sebagai contoh, privatisasi yang terjadi pada tahun 1999 sebagai salah satu bentuk “opsi” IMF. Tentu saja, masih banyak lagi contoh - contoh buruk dari dampak pinjaman yang sebenarnya tidak perlu dan tidak terkelola dengan baik. Apabila hal semacam ini berlangsung terus menerus tanpa ada perbaikan dan peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat, akan membuat keturunan kita kelak harus membayar sewa hanya untuk tinggal di tanah airnya sendiri. (Nofieman.com : 2006)

Indonesia sebagai salah satu negara pengutang terbesar, masalah utang, baik peranannya dalam pembangunan, implikasi dan kemauan melakukan pembayaran bunga dan cicilan utang merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Dengan mencermati ketahanan ekonomi Indonesia saat ini, sangat sulit mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri akan berkurang sedikit – tidaknya 10 (sepuluh) tahun kedepan. Hal ini disebabkan karena masalah utang luar negeri yang dihadapi Indonesia telah mencapai tahap yang demikian kompleks sehingga sulit untuk diupayakan pemecahan dalam waktu yang definitif.

Yang tidak kalah menarik, dengan terungkapnya kegundahan Boediono dalam menyelesaikan persoalan utang luar negeri, secara tidak langsung ia membantah pendapat yang pernah dikemukakannya di hadapan komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menyatakan bahwa persoalan utang luar negeri yang di hadapi Indonesia tidak perlu terlalu dicemaskan. Bersamaan dengan itu ia membantah pula pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjorojakti, yang menyatakan bahwa persoalan utang luar negeri yang dihadapi Indonesia tidak perlu didramatisasi. Kini, dengan semakin kuatnya desakan untuk menceraikan IMF, drama perangkap utang tampaknya justru sengaja dimainkan. (Baswir, Revrisond. 2006 : 61)

Sebenarnya Indonesia bisa mengurangi beban utang di luar negeri dengan memanfaatkan momentum *Paris Club* untuk memotong/mengurangi beban utang Indonesia yang sangat besar. Dengan berbagai alasan pendukung tentunya, seperti masih terpuruknya perekonomian Indonesia sehigga untuk pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan dana yang begitu besar ditambah lagi dengan pengeluaran biaya rekronstruksi untuk bencana yang melanda di Indonesia seperti gempa dan tsunami memerlukan dana yang tidak sedikit. Tapi sayang momentum ini ternyata tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, kita hanya diberi keringanan berupa penjadwalan kembali pembayaran utang pokok pemerintah yang jatuh tempo.

## **B. Perumusan Masalah**

Faktor-faktor yang mempengaruhi hutang luar negeri di dalam penelitian ini meliputi tabungan pemerintah, neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah (terhadap dollar A.S).

Maka dalam penelitian ini diambil perumusan masalah “bagaimana arah dan besarnya pengaruh dari tabungan pemerintah, neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah (terhadap dollar A.S) terhadap hutang luar negeri di Indonesia sebelum dan sesudah krisis dari tahun 1990.I sampai dengan 2004.IV”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari tabungan pemerintah, neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah (terhadap dollar A.S) terhadap hutang luar negeri di Indonesia sebelum dan sesudah krisis.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Melalui penelitian ini diharapkan akan didapatkan gambaran yang lebih pasti mengenai arah dan besarnya pengaruh tabungan pemerintah, neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah (terhadap dollar A.S) terhadap hutang luar negeri di Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi.

2. Sebagai bahan pertimbangan, referensi dan tambahan pemikiran serta masukan untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data.**

Menggunakan data time series dari tahun 1990.I sampai dengan tahun 2004.IV. Data – data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder, yaitu data atau informasi yang dilakukan oleh pihak lain berupa bahan penulisan yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian. Adapun data skunder diperoleh dari laporan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, serta dari instansi dan sumber lain yang terkait.

### **2. Teknik Penganalisaan Data.**

Metode analisis yang digunakan untuk mengestimasi model penelitian adalah regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (OLS: *Ordinary Least Square*). Untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel-variabel Independen (Neraca transaksi berjalan, tabungan pemerintah dan nilai tukar rupiah terhadap dollar) terhadap variabel Dependen (Hutang luar negeri) sebelum dan sesudah terjadinya krisis ekonomi di indonesia digunakan model ekonometrika Uji Stabilitas Chow (*Chow Test*). Chow Test adalah alat untuk menguji *test for equality of coefficients* atau uji kesamaan koefisien (test ini ditemukan oleh *Gregory Chow*). Jika hasil observasi yang sedang kita teliti dapat dikelompokkan



menjadi dua atau lebih kelompok, maka pertanyaan yang timbul adalah apakah kedua atau lebih kelompok tadi merupakan subjek proses ekonomi yang sama (Ghozali, 2001: 55), dengan formulasi sebagai berikut :

Sebelum :  $HLN_{t1} = \lambda_1 + \lambda_2 TP_t + \lambda_3 NTB_t + \lambda_4 KURS_t + U_t$

Sesudah :  $HLN_{t2} = \beta_1 + \beta_2 TP_t + \beta_3 NTB_t + \beta_4 KURS_t + U_t$

Gabungan :  $HLN_{t3} = \alpha_1 + \alpha_2 TP_t + \alpha_3 NTB_t + \alpha_4 KURS_t + U_t$

Keterangan :

$HLN_t$  = Hutang luar negeri Indonesia

$TP_t$  = Tabungan pemerintah

$NTB_t$  = Neraca transaksi berjalan

$KURS_t$  = Nilai tukar rupiah terhadap dollar A.S.

$\lambda_1, \beta_1, \alpha_1$  = Konstanta

$\lambda_2 - \lambda_4, \beta_2 - \beta_4, \alpha_2 - \alpha_4$  = Koefisien Regresi

$U_t$  = *Stochastic Disturbance Term* (Variabel Pengganggu)

Proses analisa yang dilakukan terdiri dari pengujian variabel – variabel independen secara individu, yaitu pengujian signifikansi variabel secara individual, pengujian variabel-variabel penjelas (dependen) secara bersama-sama serta perhitungan koefisien regresi variabel-variabel independen dari fungsi hutang luar negeri Indonesia.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I     PENDAHULUAN.**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II    LANDASAN TEORI.**

Dijelaskan tentang teori – teori yang menjadi dasar kuat dan relevan dengan penelitian yang dilakukan, hubungan antar variabel dependen dan independen yang diteliti, serta tinjauan terhadap penelitian – penelitian yang pernah dilakukan dan hipotesis.

### **BAB III   METODOLOGI PENELITIAN.**

Bab ini meliputi ruang lingkup penelitian, jenis sumber dan pengumpulan data, definisi operasional variabel, model dan metode analisis data.

### **BAB IV   ANALISIS DATA.**

Berisi tentang diskripsi pengolahan data, analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasannya (penerapan metodologi penelitian, perbandingan hasil penelitian dengan kriteria – kriteria yang ada, pembuktian hipotesis).

### **BAB V    PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari penelitian dan saran – saran yang sesuai dengan penelitian.